Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor :
Tanggal :

Misi 1 : Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.1	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.	Panjang jalan (km)	Dinas Bina Marga	Primer	
		Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	Dinas Bina Marga	Primer	
		Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)	Dinas Bina Marga	Primer	
		Persentase jembatan kondisi baik (%)	Dinas Bina Marga	Primer	
		Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Primer	
1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.	Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)	Dinas Pengairan	Primer	
		Persentase embung kondisi baik (%)	Dinas Pengairan	Primer	
		Persentase waduk kondisi baik (%)	Dinas Pengairan	Primer	
1.3	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.	Jumlah pasar tradisional kondisi baik	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Primer	
1.4	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.	Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	

		Pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekunder	
		Laju inflasi (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekunder	
		Indeks Gini	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekunder	
		Rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) jenis perijinan	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Primer	
1.5	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.	Jumlah restoran dan rumah makan (unit)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
		Jumlah penginapan/hotel	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
1.6	Meningkatnya ketersediaan pusat - pusat pembinaan kesehatan.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Persentase Posyandu aktif (%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Primer	
		Persentase PKK aktif (%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Primer	
1.7	Meningkatnya ketersediaan alat- alat pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	RSUD DR. R. Soedjati Sumodiardjo	Primer	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)	RSUD DR. R. Soedjati Sumodiardjo	Primer	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan pelayanan nifas (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan kunjungan bayi (%)	Dinas Kesehatan	Primer	

1.8	Meningkatnya ketersediaan pusat - pusat kegiatan pendidikan.	% TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	Dinas Pendidikan	Primer	
		% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	Dinas Pendidikan	Primer	
		% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	Dinas Pendidikan	Primer	
		% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	Dinas Pendidikan	Primer	
1.9	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.	% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	Dinas Pendidikan	Primer	
		% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	Dinas Pendidikan	Primer	
1.10	Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.	Jenis dan Jumlah Bank dan cabang (unit)	Bagian Perekonomian Setda	Primer	

Misi 2 : Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.					
SASARAN STRATEGIS		**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**PENANGGUNGJAWAB**	**SUMBER DATA**	**KETERANGAN**
2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.2	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Angka Melek Huruf (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis (orang)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (orang)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.3	Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	APK PAUD (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APK SD/MI (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APK SMP/MTs (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APK SMA/SMK/MA (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APM SD/MI (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APM SMP/MTs (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		APM SMA/SMK/MA (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.4	Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.	Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.5	Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD–SLTA dan lembaga pendidikan non formal.	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit)	Dinas Pendidikan	Primer	

2.6	Meningkatnya Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.7	Meningkatnya Persentase guru yang telah tersertifikasi.	Persentase guru SD yang bersertifikasi (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.8	Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.	Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru SD/MI layak mengajar (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
		Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar (%)	Dinas Pendidikan	Primer	
2.9	Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.	Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
2.10	Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.	Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
2.11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm keg. olah raga.	Jumlah pemuda berprestasi (orang)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	

2.12	Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.	Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	

Misi 3 : Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.1	Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan	Primer	
3.2	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Dinas Kesehatan	Primer	
3.3	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Dinas Kesehatan	Primer	
3.4	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Persentase gizi buruk (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
3.5	Semakin minimalnya Persentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Primer	
3.6	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	Dinas Kesehatan	Primer	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	Dinas Kesehatan	Primer	

Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	Produksi pertanian tanaman pangan utama :	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		- Padi			
		- Jagung			
		- Kedelai			
		- Kacang Hijau			
		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		- Mangga			
		- Cabe Merah			
		- Melon			
		- Semangka			
4,2	Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.	Populasi produksi komoditas perkebunan utama :	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		- Kelapa			
		- Tebu rakyat			
		Populasi produksi komoditas peternakan utama :	Dinas Peternakan dan Perikanan	Primer	
		- Sapi potong			
		- Kambing			
4.3	Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.	Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Primer	
		Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Primer	
4.4	Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.	Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	

		Jumlah Penyuluh Peternakan (orang)	Dinas Peternakan dan Perikanan	Primer	
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Pemula	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
4.5	Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.	Jumlah Penyuluh Pertanian (PHP/ Pengamat Hama dan Penyakit) (orang)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Primer	
4.6	Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.	Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	

		Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
4.7	Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.	Daya beli masyarakat (Ribu Rupiah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Primer	
		Nilai ekspor (US $)	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
4.8	Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
		Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
		Jumlah pengeluaran belanja wisatawan :	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	
		- Wisatawan Nusantara (Rupiah)			
		- Wisatawan Mancanegara (US $)			
		Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	Primer	

4.9	Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Primer	
		Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (%)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Primer	
		Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (%)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Primer	
		Persentase koperasi aktif (%)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Primer	

Misi 5 : Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
5.1	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Primer	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Primer	
		Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Primer	
		Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Primer	
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan program keluarga berencana.	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (orang/desa)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	

		Jumlah PIK-KRR aktif (buah)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
5.3	Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.	Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Primer	
		Jumlah Linmas (orang)	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Primer	
5.4	Meningkatkan kesetaraan gender	Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS)(%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Persentase Perempuan dalam lembaga legislatif (%)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
5.5	Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.	Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Primer	
5.6	Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Primer	
5.7	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.	Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Primer	

		Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Primer	
		Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Primer	
		Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Primer	
5.8	Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.	Jumlah kasus / konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Primer	
		Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	Primer	
		Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Primer	
		Status Audit Keuangan Daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Primer	
5.9	Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.	Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)	Satuan Polisi Pamong Praja	Primer	

Misi 6 : Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
6.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	Jumlah penambangan tanpa ijin	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Primer	
		Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Primer	
		Persentase sampah yang terangkut (%)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	Primer	
		Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	
6.2	Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	Badan Lingkungan Hidup	Primer	
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	
		Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	Badan Lingkungan Hidup	Primer	
		Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	Badan Lingkungan Hidup	Primer	
6.3	Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)	Badan Lingkungan Hidup	Primer	
		Jumlah bangunan ber-IMB (unit)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	Primer	
6.4	Meningkatnya upaya reboisasi.	Luas lahan kritis (ha)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	
		Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	

		Luas hutan rakyat (ha)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	
6.5	Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.	Persentase kerusakan kawasan hutan (%)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Primer	
6.6	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Primer	
		Persentase rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	Primer	
		Jumlah lumbung pangan	Badan Ketahanan Pangan	Primer	
		Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)	Dinas Cipta Karya TRK	Primer	
		Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Primer	
		Luas wilayah kekeringan (ribu ha)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Primer	

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO